



Analisis Peran Akreditasi Dalam Menjamin Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar

I'anatul Adhimah An-nuriyah¹, Diva Ummul Malayda², Walid Fajar Antariksa³

Korespondensi:

adhimahianatul@gmail.com

Afiliasi:

¹Program Studi Manajemen
Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Indonesia
adhimahianatul@gmail.com

² Program Studi Manajemen
Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Indonesia
divamalayda6790@gmail.com

² Program Studi Manajemen
Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, Indonesia
walidfjr@mpi.uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar melalui pendekatan *literature review*. Fokus kajian diarahkan pada keterkaitan antara akreditasi dan mutu pendidikan, tantangan pelaksanaan akreditasi, serta strategi penguatan sistem akreditasi di era digital melalui penerapan aplikasi SISPENA. Hasil kajian menunjukkan bahwa akreditasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian administratif, melainkan juga sebagai instrumen penjaminan mutu yang mendorong sekolah untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan berkelanjutan. Tantangan utama dalam pelaksanaan akreditasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta beban administrasi yang tinggi. Transformasi digital melalui SISPENA memberikan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses akreditasi dengan dukungan integrasi data Dapodik dan Rapor Pendidikan. Selain itu, akreditasi turut berimplikasi pada penguatan budaya mutu di sekolah dasar melalui kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, partisipasi warga sekolah, dan komitmen terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan demikian, akreditasi berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan dasar yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada mutu.

Kata Kunci:

Akreditasi; Mutu Pendidikan; Sekolah Dasar.

A. PENDAHULUAN

Mutu pendidikan merupakan aspek fundamental yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sebuah negara, termasuk Indonesia. Dalam upaya menjamin mutu pendidikan, pemerintah Indonesia telah menetapkan sistem akreditasi sebagai salah satu instrumen utama untuk menilai dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, baik pada jenjang sekolah maupun perguruan tinggi. Akreditasi dimaksudkan sebagai proses evaluasi menyeluruh yang mengukur kesesuaian lembaga pendidikan terhadap standar nasional yang telah ditetapkan, tidak hanya mencakup hasil belajar atau lulusan tetapi juga input, proses, kualitas guru, manajemen organisasi, sarana-prasarana, serta iklim pembelajaran yang kondusif (Budi Susetyo dan Karwono, 2021). Standar mutu yang telah ditetapkan dalam akreditasi sekolah seharusnya diterapkan dan menjadi budaya mutu dalam mengelola lembaga pendidikan (Antariksa, 2019).

Efektivitas sistem akreditasi masih menghadapi tantangan dan kritik. Ada studi yang menunjukkan bahwa meskipun lembaga telah terakreditasi dengan peringkat tinggi, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa pemenuhan standar belum menjamin mutu secara menyeluruh, terutama dalam aspek pengajaran dan keluaran pembelajaran (Halimatus Sakdiyah dkk., 2024). Selain itu, kendala teknis pelaksanaan seperti pengumpulan dokumen manual, penilaian kuantitatif, dan kurang optimalnya tindak lanjut pembinaan pasca-akreditasi menjadi hambatan serius dalam menjadikan akreditasi sebagai instrumen pembinaan mutu yang berkelanjutan.

Di samping itu, aspek budaya mutu di lembaga pendidikan yaitu bagaimana akreditasi dijadikan bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan sering belum berkembang secara optimal. Akreditasi idealnya menjadi pemicu inovasi dan pengembangan kualitas, bukan sekadar simbol administratif lima tahunan. Oleh sebab itu, reformasi sistem akreditasi, termasuk digitalisasi proses, monitoring berkelanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, menjadi sangat penting untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan (Fadhilah dkk., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran akreditasi dalam menjamin mutu pendidikan di lembaga pendidikan Indonesia. Fokus penelitian meliputi efektivitas pelaksanaan akreditasi, hambatan dalam sistem akreditasi, dan bagaimana akreditasi dapat dikembangkan menjadi instrumen pembinaan mutu yang berkelanjutan serta relevan dengan perkembangan zaman.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Literature Review agar dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh dan terstruktur berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik akreditasi dan mutu pendidikan di sekolah dasar. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mensintesis berbagai temuan ilmiah secara sistematis agar diperoleh kesimpulan yang valid dan berbasis bukti. Dalam pelaksanaannya, peneliti meninjau 20 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir dengan mempertimbangkan keterkaitan, keterbaruan, dan kesesuaian topik penelitian. Pembatasan waktu tersebut dilakukan agar hasil kajian tetap relevan dengan dinamika kebijakan dan implementasi sistem akreditasi di era digital saat ini.

Artikel-artikel tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik sintesis tematik untuk menemukan pola, kecenderungan, serta perbedaan temuan antar penelitian. Hasil sintesis ini menjadi dasar dalam menarik kesimpulan mengenai sejauh mana akreditasi berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar. Metode ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki landasan ilmiah yang kuat dan merepresentasikan perkembangan penelitian terkini terkait topik yang dikaji.

C. HASIL & PEMBAHASAN

Konsep Dasar Akreditasi Sekolah dan Mutu Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akreditasi dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan resmi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang kepada suatu lembaga pendidikan setelah melalui proses penilaian yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut memenuhi standar atau kriteria tertentu. Secara sederhana, akreditasi adalah kegiatan menilai dan memutar balikan lembaga pendidikan yang dilakukan oleh tim ahli (disebut asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini dijalankan oleh lembaga independen di luar sekolah atau madrasah, dan hasilnya berupa pengakuan bahwa lembaga tersebut layak beroperasi sesuai standar yang berlaku. Akreditasi sekolah merupakan proses evaluasi dan pengesahan yang menilai kelayakan dan kinerja lembaga pendidikan, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), dengan hasil berupa peringkat kualitas lembaga tersebut (Suharsono dkk., 2024).

Di Indonesia, pelaksanaan akreditasi bersifat wajib bagi semua sekolah dan madrasah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa: (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu satuan pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar baik formal maupun nonformal di berbagai jenjang; (2) dilaksanakan secara akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan; dan (3) dilakukan dengan kriteria yang terbuka. Melalui hasil akreditasi, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kualitas dan kelayakan suatu

lembaga pendidikan. Sementara itu, bagi pihak sekolah atau madrasah, akreditasi menjadi bentuk pengakuan dari pihak luar atas usaha dan kinerja yang telah dilakukan (Shufa, 2018) .

Dalam prosesnya, sekolah harus memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan utama. Standar tersebut meliputi: (1) Standar Isi, yang berkaitan dengan kurikulum pengembangan; (2) Standar Proses, yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran; (3) Standar Kompetensi Lulusan, yang menilai pencapaian hasil belajar siswa; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang mencakup kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; (5) Standar Sarana dan Prasarana, yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas belajar; (6) Standar Pengelolaan, yang menilai tata kelola sekolah; (7) Standar Pembiayaan Pendidikan yang berhubungan dengan pengelolaan dana pendidikan; dan (8) Standar Penilaian Pendidikan, yang mencakup sistem evaluasi hasil belajar siswa.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga akreditasi pendidikan merupakan proses penilaian menyeluruh terhadap kualitas dan kelayakan suatu satuan pendidikan berdasarkan standar nasional yang berlaku. Penilaian ini dilakukan oleh BAN-PDM sebagai bentuk tanggung jawab lembaga pendidikan kepada masyarakat

Menurut Joseph Juran yang dikutip oleh W.R. Nasution , mutu dapat diartikan sebagai *"fitness for use"* atau kesesuaian antara fungsi dan penggunaan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasan pelanggan. Artinya, sesuatu dikatakan bermutu apabila dapat digunakan dengan baik sesuai tujuan dan memberikan kepuasan bagi penggunaannya. Dalam konteks pendidikan, (Wahida Raihan Nasution, 2022).

Umiarso dalam bukunya mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi mutu pendidikan diantaranya adalah Bukti fisik (*tangible*). Dimensi ini menekankan pentingnya sarana dan prasarana sebagai bukti nyata kualitas lembaga pendidikan. Keandalan (*reliability*). Keandalan menunjukkan kemampuan lembaga pendidikan untuk memberikan layanan yang konsisten, dapat dipercaya, dan sesuai dengan janji yang telah dibuat. Daya Tanggap (*responsiveness*). Dimensi ini berkenaan dengan kemampuan guru dan staf, yakni keinginan untuk membantu peserta didik dan memberikan pelayanan yang tanggap. Jaminan (*assurance*). Jaminan berkaitan dengan rasa aman dan kepercayaan yang dirasakan oleh peserta didik serta masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Empaty (*empathy*). Lembaga pendidikan pada aspek ini berusaha untuk mengenali kebutuhan dan harapan pelanggan pengguna layanan, sekaligus mampu memberikan layanan yang bersifat personal kepada mereka (Nawaroni dkk., 2022)

Secara keseluruhan, mutu pendidikan merujuk pada seluruh ciri khas dan kemampuan institusi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan yang diantisipasi atau tersirat secara implisit. Konsep mutu pendidikan mencakup tiga komponen utama: input, proses, dan output. Input pendidikan mencakup segala sesuatu yang harus disiapkan agar proses belajar dapat berjalan, seperti sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa), sarana prasarana, dana, serta perangkat kebijakan. Proses pendidikan meliputi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sekolah, serta interaksi antara guru dan siswa yang menciptakan suasana belajar yang efektif. Output pendidikan adalah hasil dari proses tersebut, yang bisa dilihat dari prestasi belajar, keterampilan, dan karakter peserta didik (Hopkins & Jackson (2002); Kusnandi, 2017).

Dengan demikian, mutu pendidikan adalah ukuran seberapa baik suatu lembaga pendidikan dalam memberikan layanan dan hasil yang sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan kepuasan pengguna (seperti siswa, guru, maupun masyarakat). Tujuan utama akreditasi bukan hanya untuk menilai apakah lembaga sudah memenuhi standar mutu pemerintah, tetapi juga

sebagai sarana refleksi dan evaluasi berkelanjutan agar sekolah terus meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikannya demi terciptanya kepuasan serta kepercayaan masyarakat.

Peran Akreditasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar

Di tingkat Sekolah Dasar (SD), akreditasi menjadi sarana utama untuk menilai sejauh mana sekolah telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses akreditasi tidak hanya menjadi bentuk penilaian administratif, tetapi juga berperan sebagai alat evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum, kualitas guru, sarana prasarana, serta tata kelola sekolah (M dkk., 2024). Dengan demikian, Peran akreditasi tidak hanya menjamin mutu pendidikan yang tinggi, tetapi juga mendukung sekolah dalam mencapai target pembelajaran yang optimal serta mempersiapkan siswa agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Akreditasi sekolah berfungsi lebih dari sekadar memenuhi persyaratan formal, proses ini merupakan langkah komprehensif untuk mengevaluasi dan memperbaiki berbagai aspek pendidikan di Sekolah Dasar. Berikut ini beberapa metode bagaimana akreditasi membantu meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat SD (Najrul Jimatul Rizki dkk., 2024):

1. Menetapkan Standar Mutu Pendidikan. Akreditasi menjadi pedoman bagi sekolah dalam menjaga konsistensi mutu pembelajaran, manajemen, dan pelayanan pendidikan.
2. Mendorong Evaluasi Diri Sekolah. Sekolah melakukan refleksi terhadap kinerjanya agar mengetahui area yang perlu diperbaiki.
3. Meningkatkan Profesionalisme Guru. Guru terdorong untuk mengembangkan kompetensi melalui pelatihan dan inovasi pembelajaran.
4. Memperkuat Manajemen Sekolah. Akreditasi menuntut tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya.
5. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. Nilai akreditasi yang baik menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah.
6. Membuka Akses Dukungan Tambahan. Sekolah berakreditasi baik berpeluang memperoleh bantuan dana, fasilitas, serta program peningkatan mutu.

Dengan demikian, akreditasi berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pengakuan formal terhadap kelayakan sekolah, tetapi juga sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan yang memastikan sekolah selalu berkembang dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh peserta didik.

Secara keseluruhan, akreditasi telah menjadi bagian integral dari proses transformasi pendidikan di Indonesia. Melalui perbaikan berkelanjutan dan sistem evaluasi yang terstruktur, akreditasi turut mengarahkan lembaga pendidikan untuk lebih responsif terhadap perubahan zaman, kebutuhan dunia kerja, dan tuntutan globalisasi (Irma & Suparto, 2025).

Tantangan dan Permasalahan dalam Pelaksanaan Akreditasi

Tantangan dan permasalahan sering kali muncul dalam proses akreditasi, baik bagi lembaga akreditasi itu sendiri maupun bagi sekolah yang akan diakreditasi, adapun tantangan dan permasalahan yang kerap kali muncul dalam proses akreditasi sekolah adalah sebagai berikut (Halimatus Sakdiyah dkk., 2024):

1. Tantangan dan permasalahan Asesor dalam Akreditasi
 - a) Manipulasi Data

Salah satu kendala terbesar dalam akreditasi adalah keakuratan data. Masih ada sekolah yang memanipulasi data agar terlihat telah memenuhi standar, misalnya

dengan melebihi jumlah kegiatan atau fasilitas yang dimiliki. Hal ini membuat asesor sulit menilai kondisi sebenarnya di lapangan. Oleh karena itu, asesor harus memiliki kemampuan analisis yang tajam agar hasil penilaian tetap objektif dan akurat.

b) Akses sekolah yang sulit dijangkau

Sebagian sekolah berada di daerah terpencil, seperti pegunungan atau pulau kecil, sehingga sulit dijangkau oleh tim asesor. Kondisi ini menghambat proses visitasi dan pengumpulan data, serta menambah biaya dan waktu pelaksanaan akreditasi. Akibatnya, proses penilaian bisa tertunda dan tidak sekomprehensif sekolah di wilayah yang mudah diakses.

c) Keterbatasan Tim Asesor

Jumlah asesor yang sedikit dibandingkan banyaknya sekolah yang harus diakreditasi menjadi tantangan tersendiri. Beban kerja yang berat membuat kualitas penilaian bisa menurun. Selain itu, antrean sekolah yang menunggu giliran akreditasi menjadi panjang, yang bisa berdampak pada citra sekolah karena status akreditasi belum diperbarui.

2. Tantangan dan permasalahan Lembaga Pendidikan dalam Akreditasi

a) Kesenjangan antara Guru Senior dan Junior

Perbedaan kemampuan antara guru senior dan guru muda sering menjadi kendala. Guru senior berpengalaman dalam administrasi, namun kurang terbiasa dengan teknologi digital. Sebaliknya, guru junior lebih mahir teknologi, tetapi kurang paham dalam penyusunan dokumen akreditasi. Kurangnya koordinasi ini membuat proses penyusunan dokumen menjadi lambat dan tidak efisien.

b) Sarana dan Prasarana Kurang Memadai

Keterbatasan fasilitas seperti komputer, printer, dan koneksi internet menjadi hambatan utama, terutama di daerah yang infrastruktur teknologinya belum memadai. Sistem akreditasi saat ini menggunakan platform digital Sispena (Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah), yang membutuhkan jaringan internet stabil. Sekolah yang kesulitan akses internet sering kali tertinggal dalam proses unggah data dan penyelesaian administrasi.

c) Bukti Fisik yang Sering Hilang

Banyak sekolah belum memiliki sistem arsip yang rapi, sehingga dokumen penting seperti laporan kegiatan, sertifikat, dan bukti administrasi sering tercecer atau hilang. Saat asesor membutuhkan bukti fisik, sekolah menjadi kewalahan mencarinya. Hal ini dapat menurunkan nilai akreditasi karena bukti tidak dapat ditunjukkan secara lengkap.

d) Banyaknya Beban Administrasi Guru

Guru di sekolah tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga harus mengerjakan berbagai tugas administratif seperti membuat RPP, mengisi data Sispena, dan menyiapkan dokumen pendukung akreditasi. Banyaknya tanggung jawab ini membuat guru kesulitan membagi waktu antara mengajar dan menyiapkan berkas akreditasi, yang akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas keduanya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam akreditasi, baik bagi asesor maupun lembaga pendidikan, diperlukan langkah-langkah yang terarah dan efisien. Asesor dapat memanfaatkan teknologi seperti video conference dan sistem laporan yang berani untuk memverifikasi data serta melakukan observasi di sekolah yang sulit dijangkau. Selain itu, penambahan jumlah asesor dan pelatihan rutin perlu dilakukan agar proses akreditasi lebih cepat dan akurat. Dari sisi

lembaga pendidikan, pelatihan bagi guru senior dan junior sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi dan pemahaman standar akreditasi. Pemerintah harus memastikan tersedianya fasilitas penunjang, seperti koneksi internet yang handal dan perangkat teknologi yang sesuai kebutuhan. Penerapan sistem manajemen dokumen digital serta penggunaan perangkat lunak administrasi akan membantu mengurangi kehilangan data dan beban administratif, sehingga guru dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Sekolah perlu memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses akreditasi. Strategi ini bisa dilakukan dengan cara mengatur waktu secara lebih efisien, meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarstaf sekolah, serta menyiapkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Misalnya, membentuk tim akreditasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab jelas, menyiapkan tenaga profesional yang kompeten, dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan pihak terkait lainnya juga sangat dibutuhkan agar sekolah memiliki bantuan dan sumber daya yang memadai untuk mengatasi berbagai kendala. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses akreditasi dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan hasil maksimal dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah (Nawaroni dkk., 2022).

Strategi Penguatan dan Inovasi Sistem Akreditasi di Era Digital

Perkembangan pendidikan di era digital menuntut adanya perubahan sistem akreditasi sekolah untuk terus bertransformasi dari sistem manual menjadi berbasis teknologi. Akreditasi kini dipahami tidak hanya sebagai evaluasi rutin, namun juga merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan guna meningkatkan mutu sekolah secara menyeluruh. Perubahan ini diwujudkan melalui penggunaan aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah (SISPENA). SISPENA merupakan sebuah aplikasi digital resmi yang digunakan oleh sekolah untuk mengunggah dokumen yang berkaitan dengan akreditasi dan juga digunakan untuk memantau hasil penilaian akreditasi secara online. Keberadaan SISPENA menjadi angin segar bagi sekolah karena memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses akreditasi. Selain itu, juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dari sebuah lembaga. Integrasi dengan data Dapodik dapat membantu sekolah dalam melaksanakan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) yang mana hal ini menjadi dasar yang penting bagi sekolah dalam melaksanakan akreditasi.

Penelitian (Hadiyanto dkk., 2024) menjelaskan bahwa kegiatan digitalisasi manajemen sekolah dasar dilakukan menggunakan berbagai aplikasi pendidikan seperti ARKAS, SIPLah, dan SISPENA yang mana berguna dalam menyusun bukti fisik serta laporan akreditasi secara lebih efektif dan efisien. Melalui aplikasi ini sekolah akan mampu memperlihatkan data keuangan, dokumen kelembagaan yang terstruktur, dan capaian pembelajaran sehingga akan mempermudah proses verifikasi yang dilakukan oleh asesor. Inovasi ini menunjukkan bahwa Peningkatan pada proses akreditasi tidak hanya terbatas pada pencapaian nilai semata saja, melainkan juga mencakup pada pengembangan sistem manajemen mutu yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sementara itu, temuan (Rusnati dkk., 2022) mendeskripsikan bahwa berhasil atau tidaknya kegiatan akreditasi digital di sekolah dasar Sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan kepala sekolah yang menguasai *e-leadership*. Pemimpin yang memahami bagaimana menggunakan aplikasi SISPENA tentu akan dapat mengarahkan guru maupun tenaga kependidikan dalam melakukan proses input instrument dan senantiasa memastikan kelengkapan bukti dokumen sesuai dengan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu melalui adanya sistem ini,

juga membantu kepala sekolah dalam memantau bagaimana mutu sekolah secara langsung dan mampu memberikan pembinaan serta perbaikan pada aspek yang masih lemah. Sehingga, proses transformasi digital di bidang akreditasi ini juga membantu memperkuat fungsi dari supervisi akademik dan manajerial pada Tingkat satuan lembaga pendidikan.

Sejalan dengan itu, (Nurhayadi dkk., 2023) menegaskan bahwa implementasi SISPENA di BAN-S/M Provinsi Bali menjadi contoh konkret penerapan digital government di sektor pendidikan. Proses akreditasi berbasis digital terbukti meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat validasi data sekolah, serta memperkuat transparansi antara asesor dan satuan pendidikan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan kolaborasi lintas pihak agar sistem akreditasi digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia

Senada dengan hal tersebut, (Hasna, 2024) melalui kegiatan analisis SWOT terkait bagaimana digitalisasi sekolah dasar di Kota Banjarmasin menegaskan bahwa inovasi akreditasi secara digital harus tetap memperhatikan empat komponen utama, yakni infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, kebijakan dan budaya kerja dari sebuah lembaga. Kekuatan utama dari digitalisasi akreditasi terletak pada ketersediaan sistem seperti SISPENA yang sudah terintegrasi, namun tantangan terbesarnya terletak pada keterbatasan kemampuan literasi digital di kalangan guru maupun tenaga administrator sekolah. Oleh karenanya, strategi penguatan akreditasi tentu perlu diarahkan pada pelatihan penggunaan sistem akreditasi digital dan pendampingan secara teknis agar seluruh warga sekolah mampu secara efektif beradaptasi dengan teknologi.

Selain itu, dalam konteks peningkatan kompetensi SDM, (Fitri dkk., 2025) menjabarkan bahwa literasi guru dalam hal digital menjadi faktor penentu keberhasilan dalam implementasi e-akreditasi. Guru yang mampu beradaptasi dan memahami mengenai teknologi informasi tentu akan mampu menyiapkan dokumen pendukung akreditasi dan berkontribusi secara aktif dalam pengumpulan data mutu pembelajaran melalui aplikasi Dapodik maupun Rapor Pendidikan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pentingnya program pelatihan yang berkelanjutan agar guru maupun tenaga administrasi mampu menggunakan sistem akreditasi digital dengan baik. Tanpa SDM yang siap, maka proses akreditasi melalui SISPENA tentu akan berjalan kurang optimal.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, strategi penguatan dan inovasi pada sistem akreditasi digital meliputi empat aspek utama yaitu penguatan aplikasi SISPENA sebagai sarana utama dalam kegiatan akreditasi yang telah terintegrasi dengan data pendidikan secara nasional. Selanjutnya, kepemimpinan digital kepala sekolah yang berperan dalam mengkoordinasikan terkait penginputan instrument dan pembinaan mutu. Peningkatan kompetensi digital guru maupun tenaga kependidikan dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan agar mereka dapat mengelola bukti akreditasi secara digital. Pembentukan budaya mutu digital di lingkungan sekolah menjadikan akreditasi bukan hanya sekedar kegiatan administratif saja, tetapi merupakan proses refleksi bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas pendidikannya secara berkelanjutan. Dengan demikian digitalisasi melalui SISPENA bukan hanya sekedar alat penilaian semata, tetapi juga strategi untuk memperkuat pengelolaan mutu pendidikan dasar di Indonesia.

Implikasi Akreditasi terhadap Pengembangan Budaya Mutu

Akreditasi memainkan peranan yang cukup strategis dalam membangun budaya mutu di lingkungan sekolah dasar. Setelah pelaksanaan akreditasi selesai, sekolah tidak hanya

memperoleh nilai ataupun peringkat, namun juga mendapatkan *feedback* secara menyeluruh mengenai kekuatan maupun kelemahan dalam pengelolaan pendidikannya. Melalui rangkaian tersebut, sekolah akan terpacu untuk terus melakukan perbaikan secara terus-menerus dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Menurut (Yeti Supriyanti, Edi Rohyadi, 2024), budaya mutu di sekolah dasar akan terbentuk ketika seluruh warga sekolah memiliki kesadaran untuk mau bekerja sama sesuai standar dan melakukan evaluasi diri secara konsisten. Akreditasi berfungsi sebagai instrument untuk menumbuhkan kesadaran tersebut melalui proses refleksi dan penilaian yang sistematis.

Penelitian (Akhmad dkk., 2025) menunjukkan bahwa kepala sekolah memegang peran strategis dalam menerapkan budaya mutu setelah dilakukannya akreditasi. Selain itu, melalui pendekatan kepemimpinan transformasional, kepala sekolah menjadi motor penggerak perubahan, kolaborasi antar guru, dan memastikan tiap program dapat terukur berdasarkan data hasil akreditasi. Seorang pemimpin yang responsive terhadap rekomendasi asesor akan mampu menjadikan hasil akreditasi sebagai dasar perencanaan sekolah yang lebih terarah. Selanjutnya budaya mutu akan tumbuh karena ada mekanisme tindak lanjut yang jelas seperti rapat reflektif, monitoring berkelanjutan, dan pembentukan tim mutu internal sekolah.

Selain itu, (Arifin dkk., 2022) juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait hasil akreditasi juga turut memberikan implikasi penting dalam peningkatan mutu sekolah dasar. Hasil dari proses akreditasi bukan hanya berfungsi sebagai laporan penilaian semata, namun juga menjadi landasan dalam penentuan program pembinaan sekolah yang akan dilakukan oleh dinas pendidikan. Sekolah dengan nilai akreditasi yang rendah biasanya akan mendapatkan prioritas pendampingan, sementara sekolah berakreditasi tinggi akan biasanya akan dijadikan sebagai model atau contoh dalam program peningkatan mutu. Mekanisme ini menciptakan ekosistem kolaboratif dimana hasil akreditasi dijadikan sebagai sumber pembelajaran bersama antar sekolah, sehingga nantinya budaya mutu akan berkembang secara merata.

Selain itu, (Ananda dkk., 2025) menyatakan bahwa akreditasi adalah bentuk evaluasi terhadap kelayakan dan kinerja satuan pendidikan yang mencerminkan akuntabilitas publik. Namun, dalam pelaksanaannya muncul beberapa berbagai kendala seperti kurangnya kesiapan sekolah, terbatasnya partisipasi guru, dan kurangnya koordinasi antar pihak. Guana mengatasi hal tersebut, perlu adanya dukungan dari berbagai unsur baik guru maupun lembaga pendidikan yang lebih luas. Melalui akreditasi, sekolah akan terdorong untuk berusaha meningkatkan mutu pendidikannya agar menjadi lembaga yang unggul dan terpercaya.

Selanjutnya, penelitian dari (Yustinus, 2023) menegaskan bahwa kepala sekolah menjadi aktor utama dalam membentuk budaya mutu. Melalui pendekatan Kurikulum Merdeka, kepala sekolah memotivasi guru untuk terus mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, adaptif, dan reflektif sesuai kebutuhan peserta didik. Strategi tersebut sejalan dengan prinsip akreditasi yang menekankan pentingnya penjaminan mutu yang berkelanjutan. Kepala sekolah menjadi motor penggerak perubahan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang kolaboratif, sehingga budaya mutu akan dapat terbentuk.

Sementara itu, (Budi Susetyo dan Karwono, 2021) melalui analisis peta mutu satuan pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa hasil akreditasi mampu menggambarkan Tingkat kesenjangan mutu antar sekolah dasar. Namun, di sisi lain, data tersebut menjadi peluang yang besar bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk membangun sistem pembinaan yang terarah. Apabila hasil akreditasi dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam peningkatan mutu, maka setiap sekolah memiliki dorongan untuk terus berinovasi dan memperbaiki standarnya agar mencapai standar nasional pendidikan. Dengan demikian, akreditasi berfungsi tidak hanya

sebagai alat ukur kualitas pendidikan, tetapi juga sebagai agen penggerak perubahan budaya mutu di tingkat nasional.

Dari berbagai kajian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa implikasi akreditasi terhadap pengembangan budaya mutu di sekolah dasar meliputi aspek yang krusial. Akreditasi mendorong terbentuknya kesadaran mutu secara kolektif di antara seluruh warga sekolah, karena pada prosesnya menuntut adanya refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Akreditasi juga berfungsi untuk memperkuat kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam menindaklanjuti hasil penilaian dan membangun tim kerja yang berorientasi mutu. Akreditasi juga menciptakan hubungan sinergis antara sekolah dan pemerintah, dimana hasil akreditasi menjadi dasar kebijakan pembinaan, Akreditasi juga berperan sebagai instrument pembelajaran organisasi, yang menumbuhkan budaya inovasi dan tanggung jawab terhadap hasil pendidikan. Dengan demikian, akreditasi bukan sekedar proses penilaian administratif saja, tetapi juga menjadi strategi utama untuk menanamkan budaya mutu berkelanjutan di sekolah dasar.

D. KESIMPULAN

Akreditasi dan mutu pendidikan memiliki hubungan yang erat sebagai sistem mutu yang menjamin bahwa sekolah dapat memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Akreditasi bukan sekedar proses penilaian formal, melainkan juga menjadi wadah bagi sekolah untuk melakukan refleksi dan evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, serta tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Tantangan pelaksanaan akreditasi meliputi kendala teknis, administratif, dan sumber daya manusia, seperti keterbatasan asesor, sarana prasarana yang kurang memadai, serta beban administrasi guru yang tinggi. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan literasi digital, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan infrastruktur agar proses akreditasi lebih efisien dan objektif. Digitalisasi akreditasi melalui penerapan aplikasi SISPENA membawa inovasi dalam sistem penilaian mutu sekolah dasar dengan proses yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi dengan data nasional seperti Dapodik dan Rapor Pendidikan. Digitalisasi ini juga memperkuat supervisi kepala sekolah serta mempermudah guru dalam pengelolaan dokumen akreditasi.

Implikasi akreditasi terhadap budaya mutu tampak dalam meningkatnya kesadaran kolektif warga sekolah terhadap pentingnya mutu, kepemimpinan kepala sekolah yang transformasional, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Akreditasi mendorong lahirnya budaya inovatif, kolaboratif, dan bertanggung jawab dalam menciptakan pendidikan dasar yang unggul dan berdaya saing.

REFERENSI

- Akhmad, Dwiyono, Y., & Anggreini, P. (2025). Formulasi Strategik Kepala Sekolah dalam Membangun Budaya Mutu di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tenggarong, Kalimantan Timur. *Abdimas Indonesian Journal*, 5(2), 7–12. <https://doi.org/10.59525/aij.v5i2.809>
- Ananda, R., Nabila, A., Sari, B. P., Nabila, D., & Hurrahma, M. (2025). Akreditasi Sekolah Dasar dan Problematikanya. *Jurnal Pedagogik Pendidikan Dasar*, 12(1), 70–78.
- Antariksa, W. F. (2019). Analisis Sistem Penjaminan Mutu di Sekolah Dasar Berbasis Islamic Fullday School. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/mad.v11i2.5847>
- Arifin, S., Syaifuddin, M., & Andriani, T. (2022). Kebijakan Pemerintah Tentang Hasil Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2), 294–298.
- Budi Susetyo Dan Karwono. (2021). Peta Mutu Satuan Pendidikan Di Indonesia Berdasarkan Akreditasi Tahun 2020. *J U R N A L Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14, 1–10.

- Fadhilah, A., Ramadani, Sandy, Aslamiah, & Cinantya, C. (2024). Akreditasi Sekolah Dan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 1–23.
- Fitri, R. M., Khoerunnisa, H., Andini, S. E., Herlina, & Mahmudah, A. N. (2025). Analisis Pengaruh Kemampuan Digitalisasi Guru Terhadap Keberhasilan Kebijakan yang Diterapkan di Sekolah Dasar. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(May), 405–408.
- Hadiyanto, P., Nurkolis, N., & Haryati, T. (2024). Manajemen Digitalisasi Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 2 Patukangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 5(2), 783–793. <https://doi.org/10.51874/jips.v5i2.281>
- Halimatus Sakdiyah, Pramudita Retno Palupi, & Indah Saputri. (2024). Efektivitas Akreditasi Sekolah sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Indonesia*, 1(4), 29–44. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v1i4.73>
- Hasna, M. (2024). Digitalisasi Pengelolaan Sekolah Dasar Negeri Kota Banjarmasin: Tinjauan Analisis SWOT Dalam Strategi Pengembangan Sekolah Digital. *Jurnal Pendidikan Modern*, 10(1), 32–42. <https://doi.org/10.37471/jpm.v10i1.1053>
- Hopkins & Jackson (2002)Kusnandi. (2017). Konsep Dasar dan Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan: Sebagai Review Kebijakan Mutu Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 1(2), 107–118.
- Irma, D., & Suparto. (2025). Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi: Kajian Kebijakan di Indonesia. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 513–520. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1264>
- M, N., Rosbianti, R., Nur, M. A., & Hambali, M. (2024). Peran Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(4), 3260–3265. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.6964>
- Najrul Jimatul Rizki, Siti Qomariyah, & Neneng Neneng. (2024). Peran Akreditasi Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDIT Adzkia 1 Sukabumi. *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(3), 137–152. <https://doi.org/10.47861/khirani.v2i3.1277>
- Nawaroni, K. A., Safiyah Riyantini, Salfen Hasri, & Sohiron Sohiron. (2022). Peran Akreditasi Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Kota Batam. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 408–421. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.51>
- Nurhayadi, I. K., Dantes, K. R., & Sunu, I. G. K. A. (2023). Sekolah/Madrasah Di Ban-S/M Provinsi Bali Tahun 2022 Sebagai Wujud Digital Government Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 14(2), 161–170.
- Rusnati, I., Gaffar, M. F., Komariah, A., Suhardan, D., & Mulyani, S. (2022). Persepsi Kepala Sekolah Terhadap Sistem Digitalisasi Pengelolaan Sekolah Dasar Di Sd El Fitra. *Jurnal Al Burhan*, 1(2), 8–13. <https://doi.org/10.58988/jab.v1i2.41>
- Shufa, N. K. F. (2018). Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal Di Sekolah Dasar (Sebuah Kerangka Konseptual. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(1), 49.
- Suharsono, Purwaningsih, F., & Sirojuddin, W. (2024). Akreditasi Sekolah Atau Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam. *Educata : Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 14(1), 22–37. <https://doi.org/10.69879/xjf81h91>
- Wahida Raihan Nasution. (2022). Konsepsi Manajemen, Manajemen Mutu Dan Manajemen Mutu Pendidikan. *ALACRITY : Journal Of Education*, 2(1), 26–34.
- Yeti Supriyanti, Edi Rohyadi, E. S. R. (2024). Strategi Pengembangan Budaya Mutu Di Sekolah Dasar. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09.
- Yustinus, Y. (2023). Strategik Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3(December), 11–24. <https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2902>